



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HUSNI MUBARROK  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
3. NHK : 622731

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                      | <b>Rp.</b> | <b>120.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/12 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 |            |                    |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                             | <b>Rp.</b> | <b>151.000.000</b> |
| 1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000                                   |            |                    |
| 2. MOTOR, HONDA SCOOPY SPD MOTOR R2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000                      |            |                    |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                          | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                      | <b>Rp.</b> | <b>4.699.662</b>   |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                           | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>Sub Total</b>                                                                                  | <b>Rp.</b> | <b>275.699.662</b> |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                                | <b>Rp.</b> | <b>163.300.000</b> |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                                          | <b>Rp.</b> | <b>112.399.662</b> |

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASDIVIA SYIDRATA SAKTI  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
3. NHK : 232841

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.640.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.203 m2/80 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000  
2. Tanah Seluas 1.492 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.000.000  
3. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000  
4. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000  
5. Tanah Seluas 60.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000  
6. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000  
7. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000  
8. Tanah Seluas 25.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000  
9. Tanah Seluas 12.157 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000  
10. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/50 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000  
11. Tanah Seluas 35.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH



TANPA AKTA Rp. 300.000.000

12. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH

TANPA AKTA Rp. 20.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA

JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HILUX DOUBL CABIN PICK UP Tahun 2011,

HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

2. MOBIL, TOYOTA PICK UP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. ---**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 1.200.000**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. ---**

**Sub Total**

**Rp. 1.791.200.000**

**III. HUTANG**

**Rp. ---**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

**Rp. 1.791.200.000**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANHAR
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 848173

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 789.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/46 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 458.000.000
2. Tanah Seluas 14.570 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , WARISAN Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m2/58 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. Tanah Seluas 10.704 m2 di KAB / KOTA SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 180.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5 HP(4x2) 5 AT/ JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.000.000

**D. SURAT BERTAGIH** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 996.000.000

**III. HUTANG** Rp. 180.000.000



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

816.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DPRD

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZIDNI AISYAH  
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN  
3. NHK : 745955

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>1.950.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 1.000.000.000     |            |                      |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000 |            |                      |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000  |            |                      |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                               | <b>Rp.</b> | <b>175.000.000</b>   |
| 1. MOBIL, BRIO RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000                                         |            |                      |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                            | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>115.754.211</b>   |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                             | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| Sub Total                                                                                           | <b>Rp.</b> | <b>2.240.754.211</b> |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                                  | <b>Rp.</b> | <b>----</b>          |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                                            | <b>Rp.</b> | <b>2.240.754.211</b> |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi





pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : SALIMAN
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN TATALAKSANA
- NHK** : 723356

**II. DATA HARTA**

|                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>400.000.000</b> |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 536 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000 |            |                    |
| 2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000                     |            |                    |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                                               | <b>Rp.</b> | <b>4.000.000</b>   |
| 1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000                                   |            |                    |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                                            | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                                        | <b>Rp.</b> | <b>7.000.000</b>   |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                                             | <b>Rp.</b> | <b>----</b>        |
| <b>Sub Total</b>                                                                                    | <b>Rp.</b> | <b>411.000.000</b> |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                                  | <b>Rp.</b> | <b>45.000.000</b>  |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                                            | <b>Rp.</b> | <b>366.000.000</b> |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.